

**PERAN BANK SENTRAL DALAM MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN
SISTEM PEMBAYARAN “QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDAR”
SECARA NASIONAL**

Joselina Tuhuteru

Albert Saleky

Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email: joselina.tuhuteru@gmail.com

ABSTRACT

The main purpose of this study is to find out how the central bank's role in maximizing the use of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) payment system nationally, especially at the Bank Indonesian Representative Office in Maluku Province. In this study, the author conducted several stages of observation, interviews and looked for sources from books that could provide information related to the development of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) payment system. The results showed that the development of the payment system, especially in Maluku province, has not been optimal because Maluku Province is free of islands, so it is quite difficult to conduct education to increase awareness from the people of Maluku Province about the development of the payment system for people outside the city of Ambon so that the highest percentage of users of the Indonesian Standart Quick Response Payment system is found in the city of Ambon, which is 70% of the 37,447 users who have been acquired

Keywords : QRIS, Maluku and Payment System

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang menempati posisi ke empat sebagai Negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Hal tersebut menjadi suatu tinjauan bagaimana sistem perekonomian serta perkembangan di Negara tersebut. Dilihat dari sisi perekonomian maka perekonomian di Indonesia memiliki perkembangan yang baik. Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan perekonomian di Indonesia bisa mencapai kisaran 4,7%-5,5% pada Tahun 2022. Sedangkan pada provinsi Maluku secara akumulatif, pertumbuhan ekonomian Provinsi Maluku untuk keseluruhan tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021.

Setiap Negara memiliki Bank Sentral dengan tugas dan perannya masing-masing. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia yang memiliki fungsi utama yaitu berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran dan stabilisasi sistem keuangan (www.bi.go.id). Dalam pengelolaan sistem pembayaran, Bank Indonesia selalu berupaya memaksimalkan sistem pembayaran yang lebih baik sehingga masyarakat di Indonesia merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi secara tunai dan non tunai, Bank Indonesia terus melakukan pembaruan terhadap perkembangan sistem pembayaran pada zaman modernisasi ini.

Bank Indonesia mulai bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang mana Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) merupakan suatu asosiasi nirlaba yang pendiriannya diprakarsai oleh Bank Indonesia. ASPI diharapkan dapat menjembatani aspirasi seluruh pelaku sistem pembayaran di Indonesia dengan Bank Indonesia selaku regulator sehingga tercipta industri sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, handal dan terintegrasi. Maka Kerjasama antara bank Indonesia dan ASPI mulai berjalan untuk mengembangkan suatu kanal/sistem pembayaran yang memiliki tingkat keamanan dan keakuratan tinggi sebagai suatu upaya untuk dapat memperlancar transaksi non tunai dengan cepat. Kanal pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia dan ASPI dikenal dengan nama QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*). QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai macam penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP menggunakan QR Code sistem (www.bi.go.id). Jika kita ingin melakukan pembayaran non tunai menggunakan sistem pembayaran QRIS maka kita hanya perlu mengakses ponsel dan membuka aplikasi yang telah menerapkan sistem pembayaran QRIS seperti OVO, DANA, BRImo, GOPAY dan dompet digital lainnya serta melakukan scan QR code yang telah disediakan oleh merchant.

Pengembangan QRIS ini memiliki tujuan yaitu memperlancar sistem pembayaran digital secara aman, mendorong efisiensi pemerintah, dan mempercepat inklusi keuangan digital. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang signifikan sehingga perlu untuk dipelajari lebih dalam lagi tentang sistem pembayaran tersebut, namun di era modern saat ini masih banyak lapisan masyarakat yang belum mengenal serta memahami dengan baik tentang sistem pembayaran berbasis QR Code yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan juga beberapa kalangan masih memiliki keraguan tentang bertransaksi non tunai menggunakan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan ASPI.

Sebagai tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia untuk memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard, Bank Indonesia selalu berupaya untuk menambah pengguna baru sistem pembayaran QRIS untuk semua

kalangan dengan berbagai macam strategi yang telah diterapkan, bukan tanpa alasan melainkan upaya ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan uang dalam bentuk fisik hal ini merupakan salah satu dorongan untuk menambah pengguna QRIS dikarenakan proses produksi uang rupiah juga membutuhkan anggaran yang banyak. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur untuk menjadi merchant dan costumer *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*, bagaimana peran KPwBI Maluku dalam memperkenalkan serta memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* dan apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KPwBI Maluku dalam memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*.

TINJAUAN PUSTAKA

Evolusi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan tiga unsur penggerak yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan, hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar. Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas disini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6.000 sebelum masehi (SM). Gandum, sayuran dan tumbuhan kemudian dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian. Selanjutnya uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 SM dan berupa cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Orang Tionghoa mulai memproduksi imitasi kerang *cowrie* yang terbuat dari logam dan tembaga. Sekitar tahun 100 SM, potongan kulit rusa putih dengan ukuran dan diberi berbagai jenis warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran. Swedia merupakan Negara pertama di benua Eropa yang menggunakan uang kertas di tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol.

Sistem Pembayaran Tunai

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai, perbedaan dasar terletak pada

instrumen yang digunakan yang mana pada sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. www.bi.go.id.

Sistem Pembayaran Non Tunai

Pada sistem pembayaran non-tunai, instrument yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera (*urgent*), meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan atau transaksi dengan nilai *ticket size* \geq Satu Miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk melakukan proses terhadap transaksi ini adalah *Bank Indonesia Real Time GROSS Settlement System* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Sedangkan transaksi dengan ritel meliputi transaksi antar individu dengan nilai *ticket size* $<$ Rp.Satu Miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk melakukan proses terhadap aktivisasi transaksi ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). www.bi.go.id.

Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

Alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan sangat maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non-tunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek dan bilyet giro yang diproses menggunakan mekanisme *kliring/settlement*. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar (*cash based*). Perkembangan sistem pembayaran di setiap Negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan Negara tersebut. Pada awalnya, jasa sistem pembayaran di Indonesia banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT.Pos Indonesia, namun seiring berjalannya waktu maka jasa sistem pembayaran mulai dilakukan melalui sistem perbankan di Indonesia, bahkan sampai dengan saat ini sistem perbankan sangat mendominasi perannya dalam sistem pembayaran.

Dengan berkembangnya teknologi informasi maka instrument sistem pembayaran yang pada awalnya menggunakan warkat dan penyelesaiannya dilakukan melalui sistem kliring lokal atau antar daerah, kini mulai menggunakan instrument berbasis elektronik seperti *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang mulai dioperasikan oleh Bank Indonesia sejak November 2000. Sistem BI-RTGS ini merupakan salah satu fasilitator yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk

meningkatkan keandalan, kecepatan dan kepastian dalam mengirim dan menerima dana. Selain sistem BI-RTGS, program pengembangan sistem pembayaran nasional lain yang telah dikembangkan antara lain, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ) dimana transmisi warkat kliring dilakukan secara online menggunakan komputer dan alat komunikasi elektronik, penetapan jadwal kliring, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antar Bank secara Elektronik (BI-LINE) yang merupakan sistem transfer dana elektronik secara *real time* yang penggunaannya hanya terbatas untuk lembaga keuangan bukan bank atau kantor pemerintah tertentu, Sistem Transfer Dana dalam US Dollar di Indonesia, dan Sistem Kliring Nasional.

Financial Technology

Pengertian Financial Technology (Fintech)

“Fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Aktivitas-aktivitas Fintech dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori” (Widya 2019) yaitu pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*)

Digital Payment

“*Digital payment* adalah pembayaran digital yang memiliki dua bentuk yaitu dengan menggunakan jaringan komputer dan secara digital” (Yuanita Puspita 2019), penggunaan uang elektronik dapat terjadi apabila komponen tersebut tersedia pada pemberi dan penerima uang yang dilakukan secara digital.

Quick Response Code

“QR Code adalah barcode dengan algoritma khusus yang dapat dibaca oleh pendeteksi barcode ataupun smartphone dengan menggunakan kamera” (Surekha, Anand & Indu, 2015), yang memiliki fungsi untuk menerjemahkan isi dengan cepat. QR code terdiri dari kotak persegi yang besar kemudian terdapat bagian kotak persegi yang kecil dan di dalamnya terdapat struktur pola dalam penyimpanan data terkandung dalam QR code tersebut (ISO/IEC 188044 2000). Metode pembayaran pada dompet digital (QR code) yang telah ditetapkan bersifat dinamis, hal ini terjadi karena proses pemindaian QR code membutuhkan dua data user berdasarkan kebutuhan user tersebut

QR Code Payment

“QR Code payment adalah sebuah mekanisme transfer adalah sebuah mekanisme dalam melakukan transfer pembayaran non tunai dan hanya perlu memindai kode QR dari pedagang dan melakukan transfer pembayaran” (Dorothy Sagarayani,;Aryanti at

all.,2019). QR code dapat di scan dari berbagai arah baik secara horizontal maupun vertikal, QR code yang digunakan untuk sistem pembayaran telah ditetapkan oleh bank dan lembaga keuangan non bank. Dengan penerapan QR code ini pedagang dapat memudahkan untuk sistem pembayaran non tunai yang berbasis server.

Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Bank Indonesia resmi merilis standar untuk penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) pada tanggal 1 januari 2020, sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI) ini menggunakan standar internasional EMV Co (*Europe Master Card Visa*) sebagai standar dasar dalam penyusunan QRIS, standar ini digunakan untuk mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrument, antar Negara sehingga dapat terbuka/open secure (Adibah, dkk 2019). Selain itu QR code dijadikan standar untuk sistem pembayaran di Indonesia (QRIS), setiap penyedia jasa penyelenggara sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS yang diatur dalam PADG No.21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk pembayaran (www.bi.go.id). Salah satu fungsi QR code yaitu agar suatu kode bisa dipakau melalui layanan pembayaran yang berbeda.

“Standar nasional QR code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan pengembangan kanal pembayaran penggunaan QR Code yang memiliki potensi timbulnya fergmentasi baru di industri sistem pembayaran serta untuk memperluas akseptasi pembayaran non tunai nasional secara efisien” (Mulia, 2019).

QRIS sebagai Teknologi Pembayaran Dompot Digital

“*Quick Response Code (QR code)* merupakan inovasi teknologi yang digunakan dalam metode pembayaran pada dompet digital secara umum” (Rusian, Karmawan, Suharjito, Fernandoand & Gui, 2019). QR code adalah barcode dua dimensi yang dapat menyimpan data dan memiliki fungsi dalam aspek metode pembayaran yaitu menghubungkan pengguna dengan layanan transaksi pembayaran dengan cara memindai QR code menggunakan kamera smartphone yang sudah terhubung dengan akun pengguna. Pada sisi lain, kenaikan penggunaan metode pembayaran dompet digital di Indonesia pada tahun 2018 yaitu mencapai US\$ 1,5 miliar, yang diprediksikan terus meningkat hingga mencapai US\$ 25 miliar pada tahun 2023. Hal ini mendorong Bank Indonesia untuk membuat standar untuk penggunaan QR code sebagai teknologi yang digunakan untuk metode pembayaran dengan tujuan peningkatan efisiensi transaksi. QRIS bertujuan mengusung semangat UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung) (www.bi.go.id)

PEMBAHASAN

Prosedur untuk menjadi merchant dan customer Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

1. Sebagai Merchant

Untuk menjadi merchant QRIS maka ada beberapa hal yang harus dilalui oleh calon merchant QRIS antara lain sebagai berikut

- Apabila belum memiliki *account*, buka terlebih dahulu dengan mendatangi kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran penyelenggara QRIS
- Calon merchant akan melengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut
- Tunggu proses verifikasi, pembuatan *Merchant ID* dan pencetakan kode QRIS oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran akan mengirimkan sticker QRIS
- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran

2. Sebagai Customer

Untuk menjadi customer QRIS, ada beberapa hal yang harus di

- Apabila belum memiliki akun maka dianjurkan untuk mengunduh aplikasi salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin QRIS yang sudah terdaftar di Bank Indonesia
- Melakukan registrasi sesuai prosedur Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut
- Melakukan pengisian saldo pada akun
- Menggunakan aplikasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk pada aplikasi
- Buka aplikasi, cari icon scan/gambar QR/pay, scan QRIS merchant, masukan nominal, masukan pin dan klik bayar maka selanjutnya akan muncul notifikasi transaksi pembayaran.

3. Sebagai Penyelenggara

Semua penyelenggara QR Code wajib mendapat persetujuan bank Indonesia untuk menerapkan layanan berbasis QR dan mengacu pada ketentuan mengenai QRIS yang berlaku. Syarat utama antara lain yaitu kehandalan sistem dan aplikasi, kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko, kemampuan melindungi nasabah seperti *dispute resolution* yang mudah dan tentunya kemampuan memonitor transaksi di

merchant dan nasabah yang mumpuni serta proses registrasi (KYC) nasabah dan merchant yang benar.⁵

Kelebihan dan kekurangan dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

- Kelebihan QRIS bagi merchant
 - Ada beberapa kelebihan dari penggunaan sistem pembayaran QRIS bagi merchant adalah sebagai berikut :
 - Mengikuti trend pembayaran secara non tunai - digital (Ovo, Gopay, LinkAja, DANA, Paytren, CIMB GoMobile, Pertamax, MoBRI) dan potensi perluasan penjualan karena alternatif pembayaran selain kas
 - Meningkatkan *traffic* penjualan
 - Penurunan biaya pengelolaan uang kecil/tunai :
 1. Tidak memerlukan uang kembalian
 2. Sebagian uang dari hasil penjualan langsung tersimpan di bank dan bisa dilihat nominalnya setiap saat
 3. Resiko uang tunai hilang/dicuri menurun
 - Penurunan risiko kerugian karena menerima pembayaran dengan uang palsu
Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat history transaksi
 - Membangun informasi credit profil untuk memudahkan kredit kedepan
 - Kemudahan membayar tagihan, restribusi, pembelian baran secara non tunai tanpa meninggalkan toko
 - Mengikuti program pemerintah (BI, Kementerian dan Pemda)
 - Penjualan berpotensi meningkat dikarenakan dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
 - Meningkatkan Branding
 - Kekinian
 - Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS
 - Mengurangi biaya pengelolaan kas
 - Tidak perlu menyediakan uang kembalian
 - Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- Kelebihan Bagi Costumer
 - Kelebihan penggunaan QRIS bagi costumer adalah sebagai berikut :
 - Lebih Cepat dan kekinian
 - Costumer tidak perlu repot lagi membawa uang tunai dan menerima uang kembalian dari merchant

- Costumer terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia
- Kekurangan dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran QRIS adalah selain dari bergantung pada koneksi internet adapun beberapa kekurangan dari bertransaksi menggunakan sistem pembayaran QRIS dari hasil wawancara dengan beberapa pihak merchant yaitu UMKM yang menerapkan sistem pembayaran QRIS yaitu sejauh ini tidak ada kendala dalam pemakaian namun jangka waktu untuk uang masuk ke rekening merchant cukup lama yakni bisa memakan waktu sekitar 4-5 hari kerja apalagi pada saat hari libur banyak yang tertunda untuk masuknya serta ada merchant yang menggunakan QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) LinkAja yang notifikasi pembayarannya lewat email dan emailnya harus di refresh agar notifikasinya bisa masuk dan menunggupun membutuhkan waktu beberapa menit jadi apabila penjualan banyak maka pihak merchant tidak bisa langsung mendapatkan notifikasinya dan untuk berjaga-jaga, harus difoto bukti transaksi yang dilakukan oleh konsumen.

Peran KPwBI Maluku dalam memperkenalkan serta memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Bank Indonesia selalu mengupayakan penambahan pengguna baru sistem pembayaran QRIS sebagai salah poin yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam webinar *Casual Talks on Digital Payment Innovation of Banking* yaitu Bank Indonesia memperluas penggunaan sistem pembayaran berbasis QR Code Indonesia (QRIS) dengan menargetkan 15 Juta pengguna baru pada tahun 2022.

Pada Provinsi Maluku sendiri jumlah merchant sampai dengan triwulan I tahun 2022 yang sudah terakuisisi 37.447 untuk provinsi Maluku dari 11 ibukota kabupaten dan yang tertinggi yaitu kota ambon dengan presentase sekitar 70%. Pihak KPwBI Maluku telah melakukan beberapa program terkait dalam hal memperkenalkan dan memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) antara lain

1. Bekerjasama dengan pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan beberapa jenis Kegiatan yang dilakukan yaitu lebih terfokus pada perluasan sosialisasi terkait dengan pembayaran non tunai khususnya QRIS, dengan memulai dari sisi komunitas yaitu sekolah, dengan pemaparan materi yaitu Cinta, Bangga, Paham Rupiah yang digabungkan dengan QRIS yang telah dilakukan di beberapa sekolah baik di Ambon maupun beberapa daerah di luar ambon dimana pihak KPwBI Maluku menyampaikan tentang perkembangan sistem pembayaran dan juga cinta, bangga, paham rupiah, selain sekolah pihak KPwBI Maluku juga

masuk melalui ekosistem rumah ibadah yang mana bekerjasama dengan pihak perbankan untuk melakukan sosialisasi agar kesadaran masyarakat terhadap QRIS bisa digunakan untuk donasi serta penggunaan pembayaran QRIS ini bisa dilakukan untuk rumah ibadah

2. Melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia yang tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI). Mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus generasi yang akrab dengan kemajuan teknologi harus dapat menjadi contoh dan mensosialisasikan perkembangan QRIS baik kepada rekan-rekan sesama mahasiswa maupun masyarakat di sekitarnya.
3. Melaksanakan sosialisasi *on-boarding* kepada masyarakat berbasis komunitas. Hingga triwulan IV 2021, telah dilaksanakan sosialisasi antara lain kepada komunitas Koperasi Angkatan Darat Kartika Pattimura, komunitas kuliner di Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Masariku, dan komunitas pasar tradisional di pasar passo, serta Komunitas Pengusaha Muslimah Indonesia Maluku dan kedepannya program berbasis komunitas ini akan terus dilanjutkan
4. Berkoordinasi dan komunikasi dengan PJSP Perbankan maupun Non-Bank terkait perkembangan ekspansi QRIS yang dilaksanakan oleh masing- masing PJSP
5. Menyelenggarakan *Event Bike for Rupiah* serta pasar murah juga diadakan sosialisasi terkait QRIS serta menyelenggarakan beberapa kali sosialisasi kepada ibu-ibu PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), dan juga Lantamal IX. Selain sosialisasi secara langsung, KPwBI Maluku juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial yang dimiliki KPwBI Maluku dan para pegawai KPwBI Maluku, melalui baliho, dan melakukan penyebarluasan melalui *influencer*
6. Melakukan lomba BetaQRIS yang telah di *launching* di bulan april sekaligus dengan desiminasi Laporan Perekonomian Provinsi Maluku (LPP) dan Komuditas Produk Jasa Unggulan (KPJU) dan telah disampaikan oleh pihak KPwBI Maluku bahwa untuk masyarakat yang berpartisipasi nanti akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan hadiah sampai dengan puluhan juta dengan mengupload bukti transaksi menggunakan QRIS dan yang sudah mendaftar dan berpartisipasi sekitar lebih dari 300 peserta dan nanti akan diumumkan pemenangnya pada akhir bulan juli serta setiap minggu akan diumumkan tiga pemenang undian mingguan dengan hadiah menarik melalui website BetaQRIS dan Instagram @bank_indonesia_maluku.
7. Pihak KPwBI telah melakukan pendekatan dengan dinas-dinas pemerintah daerah untuk mengembangkan QRIS dan sudah beberapa yang sedang dalam

pengembangan terkait dengan pembayaran retribusi dan pembayaran pajak bisa menggunakan QRIS yang masih dalam proses serta rencana kedepan dari KPwBI Maluku yaitu terkait dengan *launching* Pasar siap QRIS dan pusat perbelanjaan siap QRIS serta memperluas kesadaran masyarakat bahwa untuk melakukan pembayaran di Maluku sudah bisa menggunakan sistem pembayaran non tunai yaitu QRIS selain itu, pihak KPwBI juga sedang menyasar kampus untuk agar dapat dilakukan *launching* digitalisasi kampus

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KPwBI Maluku dalam memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Untuk tantangan sendiri KPwBI Maluku memiliki beberapa tantangan dalam memaksimalkan sistem pembayaran QRIS yaitu

➤ *Awareness*/Kesadaran Masyarakat

Tantangan yang pertama yaitu pihak KPwBI Maluku harus mengembangkan di sisi pengguna dikarenakan meskipun tersedia banyak *supply* dari sisi merchant namun pengguna masih dalam jumlah yang sedikit maka merchant yang menerapkan sistem pembayaran QRIS juga tidak berjalan efektif secara *output* maka itu harus dilakukan pengembangan dari dua sisi agar adanya keefektifan. Untuk tantangan KPwBI Maluku sendiri lebih ke kesadaran masyarakat terkait dengan pembayaran non tunai terutama QRIS karena beberapa daerah di Provinsi Maluku memang cukup maju seperti kota Ambon tapi beberapa daerah lain yang kelihatannya cukup jauh dari kategori maju dalam hal ini dari sisi kesadaran masyarakat. Jika dilihat dari *merchant* dan pengguna QRIS di kota Ambon sudah cukup banyak namun beberapa daerah seperti Buru Selatan, Maluku Barat Daya termasuk masih tertinggal jika dibandingkan dengan kota Ambon, jadi untuk kesadaran masyarakat sendiri menjadi poin penting bagi KPwBI Maluku yang terkait dengan masyarakat yang teredukasi dan perluasan di daerah kabupaten kota lain selain kota Ambon

➤ Infrastruktur

Terkait dengan infrastruktur yang mana pada provinsi Maluku ini adalah daerah kepulauan sehingga beberapa daerah yang masih memiliki *blank spot* terutama di daerah 3T yang mana untuk daerah- daerah ini belum mengetahui atau memiliki kesadaran tentang pembayaran non tunai, selanjutnya adalah kondisi ketersediaan industri perbankan yang mana ada korelasi antara jumlah kantor bank atau kantor jasa keuangan yang ada di daerah-daerah tersebut dengan tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan pembayaran digital dikarenakan untuk pembayaran digital sendiri masuk melalui industri perbankan

➤ Perferensi

Perferensi pembayaran tunai masih cukup tinggi dalam pandangan masyarakat dalam hal penggunaan pembayaran tunai di pasar, dan beberapa tempat pusat perbelanjaan, Pihak KPwBI Maluku menyadari bahwa pembayaran tunai memang tidak membutuhkan modal dan hanya uang tunai untuk dapat langsung bertransaksi

Untuk hambatan, KPwBI Maluku memiliki beberapa hambatan dalam memaksimalkan sistem pembayaran QRIS yaitu : Dari sisi KPwBI Maluku yaitu karena hanya beberapa pegawai yang menghandle untuk pengelolaan sistem pembayaran dan untuk sisi luas yaitu hambatannya adalah komitmen dari pihak-pihak untuk kerjasama yang mana seringkali pihak luar tidak memegang komitmen sehingga jika hanya dari pihak KPwBI yang berinisiasi sehingga tidak memiliki keefektifan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh kedua belah pihak, serta mengenai cakupan yang mana sangat sulit ketika pihak KPwBI untuk melakukan sosialisasi satu per satu karena akan memerlukan *effort* yang tinggi sehingga pihak KPwBI Maluku lebih ke perluasan informasi melalui media-media yang bisa digunakan seperti media sosial dan youtube.

KESIMPULAN

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Untuk menjadi merchant, costumer dan penyelenggara jasa sistem pembayaran maka ada beberapa syarat dan prosedur yang harus disiapkan serta ditempuh untuk dapat melakukan transaksi dengan sistem pembayaran QRIS; (2) Bahwa pada penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* ini memiliki keunggulan-keunggulan serta sangat efisien untuk digunakan dan juga simple serta mendukung digitalisasi sistem pembayaran, selain dari keunggulan-keunggulan adapun kekurangan/kelemahan dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran ini namun hal-hal yang menjadi kekurangan dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran QRIS ini bukanlah masalah yang menyebabkan kerugian untuk berbagai pihak. (3) Peran dari KPwBI Maluku untuk memaksimalkan sistem pembayaran QRIS pada provinsi Maluku sangatlah besar, dimulai dari aktivitas-aktivitas, kegiatan sosialisasi, lomba, serta beberapa event yang di dalamnya diutamakan untuk sosialisasi QRIS selain itu, KPwBI Maluku sedang melakukan pendekatan dengan dinas-dinas di provinsi Maluku untuk pembayaran pajak dan retribusi dengan QRIS serta ada beberapa rencana besar yang sudah direncanakan oleh pihak KPwBI Maluku untuk lebih memaksimalkan sistem pembayaran QRIS. (4). Dalam memaksimalkan sistem pembayaran QRIS, ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak KPwBI Maluku seperti

yang telah dijelaskan pada BAB III, namun berbagai upaya selalu dilakukan oleh KPwBI Maluku untuk dapat terus memperkenalkan serta meningkatkan kesadaran dari masyarakat di Provinsi Maluku terkait dengan digitalisasi QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287-297.
- Mantik, H. (2021). Pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard Menggunakan Metode Customer Presented Mode (Qris-Cpm). Studi Kasus Pt Mti. *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 8(2), 31-42.
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital. *KINERJA*, 17(2), 237-247.
- Mayanti, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerapan Quick Response Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompot Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 123-135.
- Dewi, V. I. (2006). Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 10(2).
- Musyaffi, A. M., & Kayati, K. (2020). Dampak Kemudahan Dan Risiko Sistem Pembayaran QR Code: Technology Acceptance Model (TAM) Extension. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 161-176.
- Yuni, P. (2020). Implementasi Perkembangan Teknologi Pemasaran Produk Pada Umkm Di Kota Batam. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 2, No. 1, pp. 192-199).
- Musyaffi, A. M., & Kayati, K. (2020). Dampak kemudahan dan Risiko Sistem Pembayaran QR Code: Technology acceptance model (TAM) Extension. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 161-176.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/38/PADG Intern/2020. Bank Indonesia.
- KEKDA, T. P. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Februari 2022. Ambon: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
- Sejarah Bank Indonesia. (n.d.). Retrieved Juni 20, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/>
- Utama, F. (n.d.). Retrieved Juni 20, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/Indonesia>,